



Retrospektif Investasi Sapi (Sebuah Catatan Reflektif)

Cattle Investment Retrospective (A reflective note)



Lisa Dwi Lestari, S.Pt. M.Si
APHP Ahli Pertama



Rinie Gunawan, S.Pt., M.Si
Wastukan Ahli Muda

Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa (BPS 2024) menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pertumbuhan populasi yang terus berlanjut menuntut adanya sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, merata, dan berkesinambungan. Meskipun kebutuhan pangan nasional terus berupaya dipenuhi, pangan yang berasal dari subsektor peternakan masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Dua komoditas yang menunjukkan tantangan serius dalam neraca ketersediaan adalah susu dan daging sapi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mencatat bahwa produksi daging sapi nasional pada tahun 2024 sebesar 0,37 juta ton, masih di bawah kebutuhan yang mencapai 0,77 juta ton. Artinya, produksi daging sapi nasional hanya dapat memenuhi sekitar 48% kebutuhan nasional, sementara sisanya sekitar 52% masih bergantung pada impor. Demikian juga dengan komoditas susu, kebutuhan nasional pada tahun 2024 mencapai 4,7 juta ton namun produksi nasional hanya mencapai 1 juta ton atau sekitar 21%. Defisit sebesar 3,7 juta ton atau sekitar 79% kebutuhan susu nasional dipenuhi dari impor. Rendahnya produksi susu dan daging sapi tersebut berkaitan dengan keterbatasan populasi sapi, kapasitas peternakan, dan rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut menegaskan perlunya strategi terpadu untuk penguatan peternakan sapi perah dan sapi potong.

Indonesia, with a population reaching 281.6 million people (BPS 2024), faces major challenges in ensuring sufficient food availability to meet the needs of its entire population. Continued population growth demands food production, distribution, and consumption systems that are sustainable, equitable, and resilient. Although national food needs are continually being addressed, food originating from the livestock subsector remains an area requiring particular attention and improvement.

Two commodities that present serious challenges in the supply balance are milk and beef. The Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH) records that national beef production in 2024 amounted to 0.37 million tonnes, still below national demand, which reached 0.77 million tonnes. This means that domestic beef production is able to meet only around 48% of national demand, while the remaining 52% still relies on imports. A similar situation applies to milk: national demand in 2024 reached 4.7 million tonnes, whereas domestic production amounted to only 1 million tonnes, or about 21%. The deficit of 3.7 million tonnes, or approximately 79% of national milk demand, is met through imports. The low production of milk and beef is closely linked to limitations in cattle population size, farming capacity, and low productivity. These conditions underscore the need for an integrated strategy to strengthen both dairy and beef cattle farming systems.



Ditjen PKH mengambil langkah strategis dalam mendorong penguatan peternakan sapi, yaitu melalui peningkatan investasi sapi baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Upaya ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan pihak swasta, dengan dukungan penuh dari para investor swasta (non APBN). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta ekosistem investasi yang berkelanjutan, mampu memperkuat kapasitas produksi sapi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Hingga akhir November 2025, realisasi investasi sapi di Indonesia telah mencapai 31.704 ekor, terdiri dari 12.072 ekor sapi perah dan 19.632 ekor sapi pedaging. Realisasi ini melibatkan 117 pelaku usaha, yang mendukung investasi, antara lain pelaku usaha peternakan sapi perah dan sapi potong terintegrasi, importir produk hewan, peternak lokal, dan koperasi. Sebagian besar investor menjalankan skema joint shipment untuk pemasukan sapi serta menjalin kerja sama pemeliharaan dengan koperasi dan peternak eksisting.

The Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH) has taken strategic steps to strengthen the cattle sector by promoting increased investment in cattle, sourced from both Domestic Investment (PMDN) and Foreign Direct Investment (PMA). This initiative is designed as a synergistic collaboration between the government and the private sector, with full support from private investors (non state budget/APBN). Through this approach, it is expected that a sustainable investment ecosystem will be created, capable of strengthening national cattle production capacity and reducing dependence on imports.

As of the end of November 2025, the realisation of cattle investment in Indonesia has reached 31,704 head, consisting of 12,072 dairy cattle and 19,632 beef cattle. This realisation involves 117 business actors supporting the investment, including integrated dairy and beef cattle enterprises, animal product importers, local farmers, and cooperatives. Most investors have implemented joint shipment schemes for cattle imports and established maintenance partnerships with existing cooperatives and farmers.

Dalam implementasinya, pelaku usaha yang berkomitmen melakukan investasi sapi sering kali menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan lahan yang clean dan clear, ketidakcocokan harga sewa lahan, ketidaksiapan infrastruktur dasar, hambatan pada proses perizinan, keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan, keterbatasan pasokan sapi dan tingginya harga sapi di negara asal, kendala transportasi dan logistik pengiriman sapi, kendala penyerapan hasil ternak di dalam negeri, hingga permasalahan sosial yang dihadapi pelaku usaha di wilayah peternakannya. Akibatnya, realisasi investasi sapi berjalan lambat dan hingga saat ini ketergantungan pada impor tetap tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa penguatan ekosistem investasi sapi bukan hanya soal menambah populasi ternak, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh melalui kebijakan yang jelas, dukungan infrastruktur, dan kolaborasi erat antara Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, pihak swasta, serta peternak lokal.

Menghadapi berbagai kendala investasi sapi tersebut, dukungan dan langkah perbaikan dari berbagai stakeholder terkait tidak seharusnya hanya menjadi wacana. Kementerian/Lembaga bersama pihak BUMN dan swasta perlu membangun strategi yang lebih terpadu. Penyediaan lahan dengan biaya sewa yang terjangkau menjadi hal penting sebagai langkah awal investor dalam merencanakan dan menguji kelayakan pengembangan usaha peternakannya. Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air, sistem transportasi dan distribusi akan menjamin kemudahan produksi dan menunjang keberlanjutan usaha.

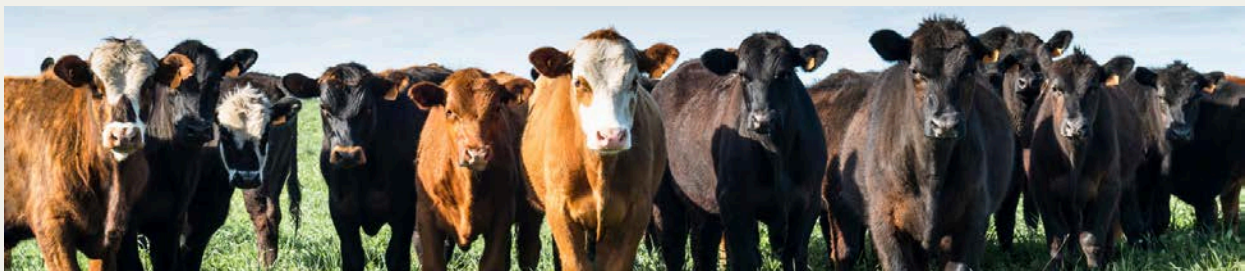
In practice, business actors committed to cattle investment often face various challenges, including limited availability of land that is clean and clear, mismatches in land rental prices, inadequate basic infrastructure, obstacles in the licensing process, limited access to capital and financing, constrained supply of cattle and high prices in source countries, transportation and logistics challenges in cattle shipment, difficulties in absorbing livestock outputs in the domestic market, as well as social issues encountered by businesses in their farming areas. As a result, the realisation of cattle investment has progressed slowly, and dependence on imports remains high. This situation illustrates that strengthening the cattle investment ecosystem is not merely about increasing livestock population, but also about building a solid foundation through clear policies, infrastructure support, and close collaboration among relevant Ministries and Agencies, State Owned Enterprises, the private sector, and local farmers.

In addressing these various constraints, support and corrective actions from relevant stakeholders should not remain at the level of discourse. Ministries and Agencies, together with SOEs and the private sector, need to develop a more integrated strategy. The provision of land with affordable rental costs is a crucial initial step for investors in planning and assessing the feasibility of livestock business development. At the same time, accelerating the development of basic infrastructure such as road access, electricity, water, and transportation and distribution systems will ensure ease of production and support business sustainability.



Penyederhanaan regulasi perizinan telah dirancang untuk memudahkan dan menarik minat calon investor. Lebih dari itu, informasi masif yang tersampaikan dengan baik kepada investor diperlukan untuk meminimalisir hambatan perizinan yang dihadapi di lapangan. Stimulus untuk berinvestasi dapat juga diberikan dengan pemberian insentif fiskal kepada para investor yang telah berkontribusi untuk membangun peternakan Indonesia. Kolaborasi perusahaan peternakan yang terintegrasi dengan koperasi dan peternak lokal juga perlu diperkuat dalam naungan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga investasi tidak hanya sekedar menambah populasi sapi, tetapi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi di tingkat akar rumput. Berbagai paket kebijakan seyogyanya dapat menumbuhkan gairah investor untuk terus mengembangkan usahanya di Indonesia sehingga upaya tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan hewani nasional.

Simplification of licensing regulations has been designed to facilitate and attract potential investors. Beyond this, the effective dissemination of comprehensive information to investors is necessary to minimise licensing obstacles encountered in the field. Investment stimulus may also be provided through fiscal incentives for investors who have contributed to the development of Indonesia's livestock sector. Collaboration between integrated livestock companies and cooperatives and local farmers should likewise be strengthened under mutually beneficial partnership schemes, so that investment does not merely increase cattle numbers but also enhances production capacity at the grassroots level. Various policy packages are expected to stimulate investor enthusiasm to continue expanding their businesses in Indonesia, thereby strengthening national animal based food security.



Selain persoalan lahan, infrastruktur, dan kelembagaan, aspek pembiayaan menjadi salah satu kendala yang sering menghambat rencana realisasi investasi. Banyak pelaku usaha, khususnya koperasi dan peternak skala mikro dan kecil, menghadapi keterbatasan akses pembiayaan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Terkhusus, skema kredit perbankan masih dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan usaha peternakan sapi karena adanya persyaratan agunan yang seringkali belum dapat dipenuhi oleh peternak, *rate* yang cukup tinggi, serta tenor pembiayaan yang belum sesuai dengan siklus usaha ternak sapi. Akibatnya, sebagian besar pembiayaan investasi sapi masih bergantung pada perusahaan swasta besar atau investor asing yang memiliki kekuatan modal, sementara peternak mikro dan kecil masih kesulitan untuk berpartisipasi karena keterbatasan terhadap akses pembiayaan tersebut. Tanpa dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif, tentunya realisasi investasi ini cenderung berjalan lebih lambat.

Beyond issues of land, infrastructure, and institutions, financing is one of the key constraints that often hinders the realisation of investment plans. Many business actors, particularly cooperatives and micro and small scale farmers, face limited access to financing from both banking and non banking financial institutions. In particular, existing bank credit schemes are still considered unable to adequately accommodate the needs of cattle farming businesses due to collateral requirements that farmers are often unable to fulfil, relatively high interest rates, and financing tenors that do not align with the cattle production cycle. As a result, most cattle investment financing continues to rely on large private companies or foreign investors with strong capital capacity, while micro and small scale farmers remain constrained in their participation due to limited access to financing. Without more flexible and adaptive financing support, the realisation of this investment is likely to progress more slowly.

Kebijakan pembiayaan yang inklusif penting untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah dapat mendorong skema kredit khusus peternakan sapi dengan bunga rendah, memperluas akses pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro, serta mengembangkan pola kemitraan antara investor besar dan koperasi serta peternak mikro dan kecil. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, investasi sapi tidak hanya akan meningkatkan populasi ternak, tetapi juga membuka peluang bagi peternak mikro dan kecil untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas usahanya.

Inclusive financing policies are essential to address these challenges. The government can promote dedicated low interest credit schemes for cattle farming, expand access to financing through microfinance institutions, and develop partnership models between large investors and cooperatives as well as micro and small scale farmers. With appropriate financing support, cattle investment will not only increase livestock populations but also create opportunities for micro and small scale farmers to enhance their capabilities and productivity.



Investasi sapi bukan hanya bertujuan untuk menambah populasi ternak. Lebih dari itu, investasi sapi menjadi sebuah upaya masif untuk membangun ketahanan pangan hewani nasional. Realisasi yang masih terbatas akibat kendala keterbatasan lahan, infrastruktur, perizinan, kelembagaan, hingga akses pembiayaan, menjadi gambaran bahwa upaya ini sungguh tidak mudah untuk dilaksanakan. Namun, di balik tantangan tersebut tersimpan peluang besar untuk mendorong keberhasilan investasi sapi, yaitu dengan memperkuat kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, dan peternak mikro dan kecil.

Demikian, catatan reflektif ini bukan untuk menilai ketidaksempurnaan dari upaya yang dilakukan, melainkan sebagai catatan untuk perbaikan yang diharapkan dapat berdampak positif bagi kemajuan subsektor peternakan Indonesia.

Cattle investment is not solely aimed at increasing livestock numbers. More broadly, it represents a large scale effort to build national animal based food security. The still limited realisation due to constraints related to land availability, infrastructure, licensing, institutional capacity, and access to financing illustrates that this endeavour is far from easy to implement. Nevertheless, behind these challenges lies significant potential to drive the success of cattle investment by strengthening collaboration among Ministries and Agencies, State Owned Enterprises, the private sector, and micro and small scale farmers.

Accordingly, this reflective note is not intended to judge the imperfections of the efforts undertaken, but rather to serve as a basis for improvement that is expected to have a positive impact on the advancement of Indonesia's livestock subsector.